



**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA PANJA RUU KEPARIWISATAAN KOMISI X DPR RI**  
**KE POLTEKPAR MAKASSAR**  
**MASA PERSIDANGAN V TAHUNAN SIDANG 2023—2024**  
**TANGGAL 21 S.D. 23 JUNI 2024**

---

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Poltekpar Makassar, untuk menyerap aspirasi publik dari para akademisi, pemda, pelaku dan organisasi pariwisata serta pemangku kepentingan pariwisata lainnya. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data mengenai ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta menyempurnakan materi muatan pengaturan RUU tentang Kepariwisata, khususnya terkait dengan kelembagaan kepariwisataan.

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si (Fraksi PAN) dengan anggota perwakilan dari masing-masing fraksi. Kunjungan ini diterima langsung oleh Direktur Poltekpar dan Sekda Pemprov Sulsel serta dihadiri akademisi dan pemangku kepariwisataan di Sulsel, antara lain perwakilan dari PHRI, ASITA, GIPI, HPI, Generasi Pesona Indonesia GenPI, PUTRI, para dosen Poltekpar dan perguruan tinggi lainnya di Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan kerja ini, juga dihadiri oleh pejabat dari mitra kerja Komisi X DPR RI, yaitu Selliane Helia Ishak, S.Kom., M.Si, selaku sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Strategis, dan Faisal, A.Md.Par., S.ST.Par., MM, selaku Direktur Standardisasi Kompetensi.

Dalam pertemuan ini, para pemangku kepentingan pariwisata yang hadir antusias menyampaikan pandangan dan masukannya, sehingga terjadi diskusi yang cukup mendalam antara tim kunjungan kerja dengan audiens yang hadir. Beberapa pandangan dan masukan yang disampaikan para pemangku kepentingan pariwisata antara lain perlunya pengaturan mengenai pemasaran dan promosi pariwisata yang lebih kreatif dan melibatkan berbagai pihak di daerah. Adapun mengenai isu kelembagaan, agar dirumuskan pola kelembagaan yang melibatkan banyak pihak, terutama perguruan tinggi, dan menjadikan kepariwisataan di Indonesia lebih berkembang. Selain itu, terdapat masukan agar jenama pariwisata Indonesia didorong sehingga hanya satu jenama secara nasional yang menggambarkan kepariwisataan Indonesia secara potensi pariwisata dan budaya yang ada di Indonesia.

Berbagai pandangan dan masukan akan menjadi bahan Panja untuk menyempurnakan draf RUU Kepariwisata dalam proses pembahasan yang akan datang bersama pemerintah.

**Makassar, 21 Juni 2024**

Tim Kunker Panja RUU tentang Kepariwisata Komisi X DPR RI ke Poltekpar Makassar